



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA
NOMOR W.2-2926.PR.01.01 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja perlu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, sebagai alat ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

6. Peraturan...

- 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA TAHUN 2020-2024
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun 2020-2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam:
1. Menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan;
 2. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
 3. Menyusun dan menetapkan laporan kinerja; dan
 4. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.
- KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan ini Kantor Wilayah akan melaksanakan:
1. Melakukan review atas capaian kinerja dalam rangka memastikan akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan capaian kinerja secara bulanan, semester dan tahunan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 1 Februari 2024
Kepala Kantor Wilayah

Mhd. Jahari Sitepu
NIP 196410081993031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
NOMOR : W.2-2926.PR.01.01 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2024

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat				Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 1.1	Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat			3,1 Indeks	DITJEN PP, BPHN, DITJEN AHU, DITJEN PAS, DITJEN IMIGRASI, DITJEN KI, DITJEN HAM
013.BB - Program Pembentukan Regulasi					Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional
	SP BB.1	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan			Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
	ISP BB.1.1	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan		3,25 Indeks	
		5250 – Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
		SK 5850.1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Daerah	
		ISK 5250.1.1	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	
		SK 5850.2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Daerah	

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
					2024	
		ISK 5250.2.1	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan		30 orang	
	SP BB.2	Dimanfaatkannya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan				Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	IKP BB 2.1	Persentase Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Disampaikan kepada K/L			20%	
		5256 – Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah				Kepala Kantor Wilayah
		SK 5256	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah	Daerah		
		ISK 5256.1	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan		1 Dokumen	
		ISK 5256.2	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah		1 Dokumen	
013.BG – Program Pemajuan dan Penegakan HAM						Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
	SP BG 1	Meningkatnya Kualitas Layanan Hak Asasi Manusia				Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
	IKP BG 1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia			3,1 Indeks	
		5255 – Penyelenggaraan Pemajuan Hak Asasi Manusia di Wilayah				Kepala Kantor Wilayah
		SK 5255.1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Daerah		
		ISK 5252.1.1	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan		50%	

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
					2024	
		ISK 5252.1.2	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan		25%	
		ISK 5252.1.3	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah		35%	
		ISK 5252.1.4	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan		75%	
		ISK 5252.1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan		3,33 Indeks	
		SK 5255.2	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Daerah		
		ISK 5252.2.1	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan		90%	
013.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						Dirjen AHU, Dirjen Pemasarakatan, Dirjen Imigrasi, Dirjen Kekayaan Intelektual dan Kepala BPHN
	SP BF 2	Meningkatnya Kualitas Layanan AHU				Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
	ISP BF.2.1	Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan AHU			3,1 Indeks	
	ISP BF.2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU			3,5 Indeks	
		5251 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				Kepala Kantor Wilayah
		SK 5251.1	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		ISK 5251.1.1	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah		6%	
		SK 5251.2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
					2024	
		ISK 5251.2.1	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan		90%	
		SK 5251.3	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Daerah		Kepala Balai Harta Peninggalan
		ISK 5251.3.1	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan		90%	
	SP BF 3	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan		Pusat		Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	ISP BF.3.1	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan			84,2	
		5255 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah				Kepala Kantor Wilayah
		SK 5252.1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	Daerah		Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
		ISK 5252.1.1	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana /Anak/Anak Binaan Sesuai dengan Standar		85%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
		ISK 5252.1.2	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas		95%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
		ISK 5252.1.3	Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal		98%	Kepala Lapas/LPKA/ RSUP
		ISK 5252.1.4	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani		90%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
		ISK 5252.1.5	Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar		90%	Kepala Lapas/Rutan/ RSUP
		ISK 5252.1.6	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar		90%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
		ISK 5252.1.7	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB		90%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
		ISK 5252.1.8	Persentase Peserta Eehabilitasi (Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkat		8%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
					2024	
		ISK 5252.1.9	Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA		25%	Kepala Lapas/Rutan/LPKA
		SK 5252.2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Daerah		
		ISK 5252.2.1	Persentase Narapidana yang Memperoleh Predikat Baik pada Variabel Pembinaan Kepribadian		75%	Kepala Lapas/Rutan
		ISK 5252.2.2	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi		100%	Kepala Lapas/Rutan
		ISK 5252.2.3	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi		90%	Kepala Lapas/Rutan
		ISK 5252.2.4	Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		75%	Kepala Lapas/Rutan
		ISK 5252.2.5	Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi		34%	Kepala Lapas
		ISK 5252.2.6	Persentase Narapidana yang Bekerja		55%	Kepala Lapas
		SK 5252.3	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pemasyarakatan
		ISK 5252.3.1	Indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah		3,6 Indeks	
		SK 5252.4	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Daerah		Kepala Lapas/LPKA/Rupbasan/Bapas/RSUP/Rutan
		ISK 5252.4.1	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar		90%	Kepala Lapas/LPKA/Rupbasan/Bapas/RSUP/Rutan
		ISK 5252.4.2	Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah		90%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
		ISK 5252.4.3	Persentase Kepatuhan dan Kisiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban		90%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
					2024	
		ISK 5252.4.4	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara Tuntas		90%	Kepala Lapas/LPKA/Rupbasan/Bapas/RSUP/Rutan
		SK 5252.5	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar	Daerah		Kepala LPKA
		ISK 5252.5.1	Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat		85%	
		ISK 5252.5.2	Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi		100%	
		ISK 5252.5.3	Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar		100%	
		ISK 5252.5.4	Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal		100%	
		ISK 5252.5.5	Persentase Anak Binaan yang Mendapat Hak Hemisi		99%	
		ISK 5252.5.6	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Pengentasan Anak		100%	
		SK 5252.6	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Daerah		Kepala Rutan
		ISK 5252.6.1	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying		5%	
		ISK 5252.6.2	Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian		90%	
		ISK 5252.6.3	persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		100%	
		SK 5252.7	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	Daerah		Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
		ISK 5252.7.1	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya		90%	
		ISK 5252.7.2	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap		90%	

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
					2024	
		SK 5252.8	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	Daerah		Kepala Balai Pemasarakatan
		ISK 5252.8.1	Persentase Klien Usia Produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun Diluar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap		70%	
		ISK 5252.8.2	Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara		50%	
		ISK 5252.8.3	Persentase Klien Pemasarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial		100%	
	SP BF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian				Direktur Jenderal Imigrasi
	ISP BF.4.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian			3,14 Indeks	
		5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah				Kepala Kantor Wilayah
		SK 5254.1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Daerah		Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala UPT Keimigrasian
		ISK 5254.1.1	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani		90%	
		ISK 5254.1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani		90%	
	SP BF.5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian				Direktur Jenderal Imigrasi
	ISP BF.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian			3,3 Indeks	
		5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah				Kepala Kantor Wilayah
		SK 5254.2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Daerah		Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala UPT Keimigrasian
		ISK 5254.2.1	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Lewilayahan yang Diterima		90%	

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
					2024	
	SP BF.6	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia		Pusat		Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
	ISP BF.6.1	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual			3,1 Indeks	
		5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah				Kepala Kantor Wilayah
		SK 5253.1	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		ISK 5253.1.1	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah		30%	
	SP BF.7	Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual				Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
	ISP BF.7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual			3,36 Indeks	
		5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah				Kepala Kantor Wilayah
		SK 5253.2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		ISK 5253.2.1	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah		70%	
		ISK 5253.2.2	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah		20%	
	SP BF.8	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Hukum				Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	ISP BF.8.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum			3,08 Indeks	
		4841 – Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah				Kepala Kantor Wilayah
		SK 4841.1	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
					2024	
		ISK 4841.1.1	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah		25%	
		SK 4841.2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		ISK 4841.2.1	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi		82%	
		ISK 4841.2.2	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Ltigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi		80%	
		SK 4841.3	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		ISK 4841.3.1	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah		70%	
SS 2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM				85	SELURUH UNIT ESELON I
013.WA - Dukuman Manajemen						
	SP WA.3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
	ISP WA.3.1	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			Baik (2,4 Indeks)	
		xxxe - Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah				Kepala Kantor Wilayah
		SK xxxe	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		ISK xxxe.1	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti		80%	

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
					2024	
	SP WA.4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		Pusat		Sekretaris Jenderal
	ISP WA.4.1	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			82,00	
	ISP WA.4.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			3,00	
		6230 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BHP				Kepala Balai Harta Peninggalan
		SK 6230	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Daerah		
		ISK 6230.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP		100%	
		ISK 6230.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1 Indeks	
		6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan				Kepala Kantor Wilayah
		SK 6231	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	Daerah		Kepala Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/Rupbasan/RSU Pengayoman
		ISK 6231.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan		100%	
		ISK 6231.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1 Indeks	
		6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi				Kepala Kantor Wilayah
		SK 6232	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Daerah		Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi
		ISK 6232.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi		100%	
		ISK 6232.2	Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1 Indeks	

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN			LOKASI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
					2024	
		1558 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM				Kepala Kantor Wilayah
		SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Pusat		Kadiv Administrasi
		IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		100%	
		IKK 1.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan		3,1 Indeks	



Kepala Kantor Wilayah

Mhd. Jahari Sitepu
NIP 196410081993031001